

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketepatan Implementasi Kebijakan Program Sembako Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan apabila implementasi Program Sembako sudah terimplementasi dengan baik namun kurang optimal. Jumlah KPM Program Sembako pada tahun 2024 mencapai 410 orang atau 10,05% dari jumlah penduduk yang tersebar di 7 dusun di Desa Purisemanding. Jumlah tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang berjumlah 382 orang dengan persentase 9,36%. Persentase kenaikan KPM Program Sembako di Desa Purisemanding pada jangka waktu 1 tahun mencapai 0,69%. Implementasi Program Sembako di Desa Purisemanding sudah sesuai dengan tujuan dan manfaat Program Sembako sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Namun mengenai manfaat Program Sembako dalam hal ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem dinilai kurang optimal sebab KPM tidak merasakan perubahan yang signifikan justru angka KPM Program Sembako semakin meningkat dengan kata lain angka kemiskinan juga meningkat. Lebih lanjut kesimpulan penelitian sebagai berikut:

## **1. Ketepatan Kebijakan**

Ketepatan kebijakan dalam implementasi Program Sembako untuk pengentasan kemiskinan di Desa Purisemanding ditinjau dari beberapa sub indikator yaitu apakah kebijakan yang ada sudah memuat hal-hal yang mampu menyelesaikan masalah, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Program Sembako merupakan program pengembangan dari BPNT yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sampai pada Pemerintah Desa Purisemanding sebagai Tim Koordinasi dan monitoring kepada masyarakat langsung. Implementasi Program Sembako di Desa Purisemanding sudah cukup tepat kebijakan. Tujuan dari Program Sembako yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM dengan cara pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. KPM Program Sembako di Desa Purisemanding merasa sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan dengan adanya bantuan dari Kementerian Sosial tersebut. Namun Program Sembako belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kemiskinan di Desa Purisemanding dibuktikan dengan angka penerima yang naik.

## **2. Ketepatan Pelaksanaan**

Ketepatan pelaksanaan Program Sembako untuk pengentasan kemiskinan di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang dimaksud yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan Pemerintah Desa Purisemanding. Implementasi kebijakan ini sudah sesuai dengan peraturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan program sembako.

Pelaksanaannya sudah tepat sasaran, waktu, dan administrasi serta mengenai kelompok sasaran yang tepat. Sasaran KPM Program Sembako yaitu orang miskin yang memenuhi kriteria fakir miskin yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial. Penyaluran dana Program Sembako dilakukan dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Selanjutnya untuk administrasi penerimaan bantuan, tiap KPM memiliki KKS yang berbentuk ATM sehingga dapat melakukan pengambilan uang secara mandiri melalui bank.

Proses pelaporan berhasil atau tidaknya penyaluran bantuan dilakukan oleh pihak bank terkait langsung ke Kementerian Sosial selaku pemegang otoritas tertinggi. Pihak operator SIKS-NG bisa mengetahui berhasil tersalurkan atau tidaknya penyaluran bantuan melalui update data pada aplikasi SIKS-NG. Untuk proses penyaluran dana bantuan di Desa Purisemanding, Kementerian Sosial bekerjasama dengan bank himbara yaitu Bank BNI. Namun kendala pelaksanaan justru datang dari penyaluran dana karena di Desa Purisemanding tidak ada ATM Bank BNI yang ada hanya agen BNI yang setiap pengambilan dana akan dikenakan biaya admin. Terlebih lagi di Kecamatan Plandaan hanya ada Bank BRI dan tidak ada ATM Center lainnya.

### **3. Ketepatan Target**

Ketepatan target dalam implementasi Program Sembako untuk pengentasan kemiskinan di Desa Purisemanding sudah tepat target dan sesuai dengan kriteria fakir miskin sesuai ketentuan Kementerian Sosial. KPM Program Sembako harus terdata di DTKS dan SIKS-NG. Namun tak jarang KPM Program Sembako juga sebagai KPM bantuan sosial lainnya seperti PKH karena juga

memenuhi kriteria sebagai penerima Program Sembako. Selain itu pihak implementor juga dalam kondisi yang siap dari Pemerintah Kabupaten Jombang sampai pada Pemerintah Desa Purisemanding seperti dari segi sarana dan prasarana, serta jumlah pegawai yang memadai. Program Sembako merupakan perkembangan dari BPNT dari yang semula non tunai menjadi tunai.

#### **4. Ketepatan Lingkungan**

Ketepatan lingkungan dalam implementasi kebijakan Program Sembako untuk pengentasan kemiskinan di Desa Purisemanding cukup baik ditinjau dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu hubungan antar stakeholder instansi pemerintahan seperti Dinas Sosial Kabupaten Jombang dengan Pemerintah Desa Purisemanding yang terjalin dengan baik. Seringkali diadakan sosialisasi terhadap operator SIKS-NG oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Sedangkan lingkungan eksternal, hubungan instansi pemerintan dengan masyarakat dirasa kurang. Seperti halnya kurang komunikasi, kurang pengawasan mengenai proses penyaluran dan penggunaan dana dari Program Sembako. Terlebih lagi proses penyaluran bantuan yang langsung masuk ke ATM masing-masing KPM dan dapat diambil secara pribadi, fungsi pengawasan dirasa kurang.

#### **5.2. Saran**

Sebagaimana hasil dan pembahasan beserta kesimpulan pada penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada ketepatan kebijakan, Program Sembako tidak sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan, hanya untuk membantu pemenuhan kebutuhan

pangan dengan kata lain bersifat konsumtif dan berjangka pendek. Diharapkan kedepannya kebijakan penanganan kemiskinan dievaluasi kembali tidak hanya bersifat konsumtif

2. Ketepatan pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila tersedia sarana dan prasarana yang mumpuni pula. Diperlukannya pengkajian ulang mengenai sistem penyaluran dana yang disesuaikan dengan keadaan geografis dan fasilitas publik yang tersedia
3. Pada ketepatan target, diharapkan kedepannya untuk lebih spesifik dalam memberikan kriteria penerima Program Sembako. Selama penelitian banyak ditemukan KPM dengan usia produktif dan memperoleh bantuan sosial. Hal tersebut berpotensi besar mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Selain itu kedepannya untuk dilakukan graduasi penerima Program Sembako untuk lebih meningkatkan ketepatan sasaran.
4. Pada ketepatan lingkungan, diharapkan kedepannya Program Sembako lebih dipantau mengenai penggunaan bantuan dan dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan. Serta instansi pemerintah lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap KPM